

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PENCAIRAN ANGGARAN DIPA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA PALOPO.**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
F. Hipotesis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peneliti Terdahulu	8
B. Pengertian Anggaran	11
C. Pengertian Daftar Isian Anggaran (DIPA)	19
D. Jenis Dipa Kementerian	23
E. Faktor Penghambat Pencairan Anggaran DIPA	25
F. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Informan/Subjek penelitian	32
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Perusahaan.....	36
B. Hasil Penelitian.....	45
Pembahasan.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama beberapa dekade sebelum disahkannya peraturan Undang-undangan terkait penganggaran dan keuangan negara, Indonesia menggunakan sistem Pengelolaan Keuangan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Dengan perkembangan pelaksanaan keuangan pemerintah di berbagai negara dan tuntutan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan negara, mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi Pengelolaan Keuangan negara. Diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan komitmen bersama dalam memperbaiki sistem penganggaran negara.

Pelaksanaan peraturan keuangan negara perlu didukung oleh sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan oleh pengelola keuangan baik oleh *Chief Financial Officer* (CFO) sebagai Bendahara Umum Negara maupun *Chief Operating Officer* (COO) sebagai pengguna anggaran. Sebagai tindak lanjut penerapan sistem manajemen penganggaran maka diluncurkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagai wadah dalam menerapkan sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan negara. Modernisasi Pengelolaan Keuangan pemerintah memerlukan dukungan sistem informasi yang handal dan terintegrasi, mulai dari perencanaan anggaran, perbendaharaan dan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), pengelolaan utang, maupun pelaporan dan pengawasan. Sebagai bagian dari

reformasi di bidang keuangan sejak tahun 2004 Departemen Keuangan telah merencanakan untuk melakukan reformasi sistem informasi, khususnya di bidang perbendaharaan dan penganggaran. Rencana tersebut akan dibiayai dengan pinjaman dari Bank Dunia dalam payung *Government Financial Management and Revenue Administration Project* (GFMRAP).

Salah satu unsur utama dalam (GFMRAP) tersebut adalah proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN adalah proyek jangka panjang yang menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai *leading institutions*, meliputi pembangunan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang sesuai dengan *best practices* yang diharapkan, dengan didukung oleh sistem informasi yang modern, kementerian/lembaga negara di pusat, DPR, seluruh KPPN dan institusi pemerintah lainnya yang ditetapkan. Sistem pelaksanaan anggaran harus memenuhi sasaran dari *Public Expenditure Management* (PEM) yaitu pengawasan pengeluaran secara menyeluruh, alokasi strategis dan efisiensi pelaksanaan.

¹Undang-undang No.1 Tahun 2004, tentang “Perbendaharaan Negara” dan ²Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang “Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara” kedua paket tersebut telah meletakkan dasar-dasar Pengelolaan Keuangan Negara menyangkut Perencanaan, Penganggaran, dan *Indefendensi* pemeriksaan serta pembagian kewenangan administratif antar lembaga Negara yang ada di masing-masing di Kabupaten/Kota sekaligus menjadi landasan hukum (*framework*) Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia. Kemudian diikuti

¹ Undang-undang No.1 Tahun 2004, tentang “Perbendaharaan Negara

² Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang “Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

pada tahun 2005 mulai diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut. Undang-undang yang mengatur Pengelolaan Keuangan antara lain ³Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan dan ⁴Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam urusan dengan birokrat (suap haram)

Baik terkait dengan pengelolaan keuangan maupun kegiatan-kegiatan lainnya sangat diapresiasi oleh tuntunan syariah sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-qur'an / Qs; Al- Hasyar/59:18 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemah:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Hasyar/59:18)

Kesuksesan yang di peroleh seseorang dalam mengerjakan sesuatu yang menjadi pilihan hati nurani dan cita-cita hidupnya sesuai tuntunan agama. Jadi, meskipun secara materi seseorang itu sangat kaya namun kalau yang ia kerjakan tidak memberi makna untuk peningkatan harkatnya sebagai manusia yang saleh, maka kesuksesan itu semu dan akan sia-sia belaka

Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) pada akhir tahun saring memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang

³ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit kerja pemerintah seperti pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo.

Pencairan Anggaran di Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Paloposering mengalami hambatan seperti pengimputan rencana kerja melalui internet (jaringan), penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu, penyusunan rancangan operasional kegiatan 1 tahun mata anggaran tidak dibuat, aplikasi terhambat dengan jaringan, aplikasi sering berubah-ubah, dari satu kegiatan meliputi beberapa kegiatan yang harus diakses. Untuk melaksanakan strategi organisasi harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias atau penyimpangan dengan diberlakukannya Undang-undang Pengelolaan Keuangan Negara keleluasaan dalam merencanakan, menggali, mengalokasikan, mengendalikan dan mengawasi Pengelolaan Keuangan secara mandiri.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo berlaku untuk satu tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dan dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Dari pembahasan tersebut penulis tertarik untuk memberi judul faktor-faktor penghambat dan pengaruhnya terhadap pencairan Anggaran DIPA pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaruh faktor-faktor penghambat pencairan anggaran DIPA pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo?
2. Bagaimana Solusi menghadapi faktor-faktor menghambat terhadap pencairan anggaran DIPA pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pencairan Anggaran DIPA pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor-faktor penghambat pencairan anggaran DIPA pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo?
2. Untuk mengetahui solusi menghadapi faktor – faktor penghambat terhadap pencairan anggaran DIPA pada perusahaan Daerah Air Minum Di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan masukan bagi Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo Tentang Faktor-faktor penghambat dalam pencairan anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
2. Sebagai bahan kepustakaan atau bahan pertimbangan bagi mereka yang ingin memperdalam tentang faktor2 penghambat dalam pencairan anggaran DIPA di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis untuk lebih lanjut memahami aplikasi dari teori yang di peroleh dibangku kuliah.

E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian

Faktor- faktor penghambat yang dimaksud adalah:

a. Definisi Operasional

1. Pengimputan rencana kerja melalui internet (jaringan) adalah sering mengalami permasalahan menyebabkan hambatan terjadinya pencairan anggaran DIPA pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo.
2. Penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu sehingga menyebabkan pencairan anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggran (DIPA) tidak tepat waktu pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo.
3. Apalikasi Terhambat dengan jaringan yang tidak baik sehingga menghambat pencairan anggaran DIPA pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo.
4. Aplikasi yang sering berubah-ubah sehingga menyebabkan pencairan anggaran DIPA terlambat dicairkan pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo.
5. Pencairan DIPA adalah dilakukan berdasarkan dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) atau Pencairan pertama umumnya dilakukan pada akhir triwulan pertama dan kemudian bervariasi sesuai dengan sifat dari proyek.

b. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penelitian adalah hanya masalah pengaruh faktor-faktor penghambat dalam pencairan Anggaran DIPA pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo.

F. Hipotesis

1. H_a = Faktor penghambat mempengaruhi terhadap pencairan anggaran DIPA pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo
2. H_o = Faktor menghambat tidak mempengaruhi terhadap pencairan anggaran DIPA pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang partisipasi anggaran oleh Sardjito (2005) mengkaji sejauh mana pengaruh positif partisipasi anggaran DIPA berpengaruh positif baik secara langsung atau tidak langsung dengan kinerja pimpinan jika menggunakan variable kontijensi yaitu komitmen organisasi dan informasi *Job-relevant*.⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Industri Kecil di Bugangan Semarang yang berjumlah 198. Sedangkan sampel diambil dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* sehingga didapat sampel sejumlah 19 responden. Data penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara berdasarkan daftar pertanyaan para pimpinan LIK Bugangan Semarang yang dijadikan responden.

Teknis analisis yang digunakan adalah *path analysis*. Penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh positif dari partisipasi anggaran terhadap komitmen organisasi. Partisipasi anggaran juga berpengaruh positif terhadap informasi *job-relevant*. Kemudian terbukti pula bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif pada kinerja. Dan yang terakhir partisipasi, komitmen dan informasi *job-relevant* secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi pimpinan.

Riyadi (2000) melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial dengan menggunakan variabel motivasi dan pelimpahan wewenang sebagai variabel *moderating*.⁶ Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan *mail survey*. Responden

⁵ Sardjito, 2005

⁶ Riyadi, 2000

yang dipilih sebagai sampel penelitian adalah manajer yang berada dalam perusahaan manufaktur, berdomisili di wilayah Jawa Timur dan memiliki atasan serta bawahan. Data diperoleh dengan cara mengirimkan kuesioner kepada 340 responden yang terdaftar dalam *East Java Bussiness Directory* 1996-1997. Dari 340 kuesioner yang dikirim hanya 62 orang manajer yang mengirimkan jawaban. Namun hanya 48 kuesioner yang lengkap dan diikuti dalam analisa akhir.

Teknik pengujian hipotesa yang digunakan adalah analisa regresi berganda (*multiple regression*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi para manajer tidak mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Namun, pelimpahan wewenang ternyata mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.

Fahrianta dan Ghozali menguji kembali pengaruh partisipasi anggaran DIPA terhadap kinerja manajerial melalui motivasi intrinsik dan ekstrinsik sebagai variabel *intervening* dengan menambahkan dua variabel karakteristik sistem penganggaran lainnya yaitu kejelasan sasaran anggaran dan umpan balik anggaran. Pengumpulan data menggunakan *mail survey* yaitu mengirimkan kuesioner melalui pos kepada 700 orang manajer dan kepala bagian setingkat manajer yang memimpin departemen fungsional dalam perusahaan manufaktur di Indonesia. Dari 700 kuesioner yang dikirim hanya 96 yang kembali dan setelah diuji ulang ternyata kuesioner yang dapat digunakan berjumlah 87 kuesioner.

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik multivariate *Structural Equation Model* (SEM). Software yang digunakan untuk mengolah data adalah AMOS 4.0 dan SPSS 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya umpan balik anggaran yang dapat

dibuktikan secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja manajerial melalui dampak positif dan signifikan dari motivasi ekstrinsik.

Sedangkan partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan anggaran tidak berhasil ditunjukkan secara signifikan pengaruhnya terhadap meningkatnya kinerja manajerial melalui dampak positif dari variabel motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Soemarno (2005) meneliti pengaruh komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran DIPA dan kinerja manajerial⁷. Responden penelitian ini adalah pimpinan (manajer) kantor cabang utama bank-bank di Jakarta dengan populasi sebesar 170 kantor cabang utama. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, sebanyak 170 kuesioner dikirimkan kepada responden. Dari 170 kuesioner yang dikirim, kuesioner yang diterima kembali dan diisi lengkap sebanyak 90 kuesioner. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah *moderating regression analysis* (MRA) dan regresi interaksi antarvariabel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh dan hubungan negatif yang signifikan antara kinerja manajerial dan partisipasi anggaran, terdapat pengaruh positif signifikan komitmen organisasi terhadap hubungan kinerja manajerial dan partisipasi anggaran, dan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial adalah tidak signifikan.

Frucot and White meneliti pengaruh tingkat manajerial –posisi manajer pada jenjang organisasi- dan partisipasi anggaran DIPA terhadap kinerja manajerial dan kepuasan kerja. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada 184 manajer yang berpartisipasi dalam program pengembangan eksekutif yang dilaksanakan di Universitas besar di Amerika.

⁷ Soemarno, 2005

Data yang terkumpul sebanyak 178 kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan Analisis Regresi Ganda. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa baik tingkat manajerial maupun partisipasi anggaran memiliki hubungan (positif) langsung dengan kinerja manajerial dan kepuasan kerja. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya semua pengukuran yang digunakan adalah *self-reported* sehingga mungkin juga berdasarkan persepsi pribadi. Dengan demikian, hal ini tidak menunjukkan partisipasi formal dan pengaruhnya terhadap penyusunan anggaran. Keterbatasan yang lain, pemilihan sampel tidak secara acak sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi.

Supriyono melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh variabel *intervening* kecukupan anggaran dan komitmen organisasi terhadap hubungan antara partisipasi penganggaran dan kinerja manajer di Indonesia.

Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan 3070 kuesioner survei yang dikirimkan lewat Kantor Pos kepada 307 direktur utama perusahaan *go public* yang terdaftar pada *Capital Market Directory* tahun 2001. Kuesioner yang kembali dan diisi lengkap sebanyak 341 kuesioner. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan *path analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajer. Hubungan ini meliputi hubungan langsung dan hubungan tidak langsung yaitu melalui komitmen organisasi dan kecukupan anggaran. Komitmen organisasi terbukti merupakan variabel *intervening* dalam hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajer namun kecukupan anggaran tidak dapat dibuktikan merupakan variabel *intervening* dalam hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajer.

Yuen (2007) menguji dua faktor *antecedent* partisipasi anggaran DIPA yaitu kebutuhan akan prestasi dan sikap kerja yang positif dan kemudian untuk mengetahui dampak kedua faktor tersebut pada kinerja manajerial pada organisasi sektor publik. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner.

Kuesioner diberikan kepada 216 manajer di Departemen Pelayanan Publik, Macau. Data yang terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dua faktor kebutuhan akan prestasi dan sikap kerja yang positif mempengaruhi partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan prestasi dan sikap kerja yang positif memiliki hubungan (positif) tidak langsung dengan kinerja manajerial dengan partisipasi anggaran bertindak sebagai variabel *intervening*. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal penentuan sampel. Responden mengajukan diri sebagai sampel penelitian sehingga membuat sampel penelitian ini tidak sepenuhnya acak.

Ompusunggu dan Bawono (2007) melakukan penelitian di lingkungan sektor publik, menguji pengaruh partisipasi anggaran dan *job relevan information* (JRI) terhadap informasi asimetris. Penelitian ini dilakukan pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri di Kota Purwokerto Jawa Tengah. Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan daftar pertanyaan yang diantar kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha seluruh Unsur pelaksana yang terdiri dari Unsur Pelaksana Fakultas, Program Sarjana, Program Pasca Sarjana dan Lembaga

Teknis. Dari 46 kuesioner yang disebar, yang kembali sebanyak 31 kuesioner.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari partisipasi anggaran dan *job relevan information* terhadap informasi asimetris. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan kondisi yang terjadi di organisasi sektor bisnis dan sektor swasta khususnya dalam perilaku.

B. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Lebih lanjut⁸Mardiasmo memberikan pengertian mengenai anggaran sektor publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan :

1. Berapa Biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran /belanja);
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.

Anggaran merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo, baik Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo yang bertujuan mencari laba maupun bertujuan non laba termasuk Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo jasa, Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo dagang dan Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo industri. Sebelum Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo beroperasi, perlu adanya rencana berupa anggaran,

⁸ Mardiasmo *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Cetakan pertama, penerbit : BPFE, Yogyakarta 2004:61

sehingga jelas misi dan target yang akan dicapai pada periode berikutnya. Bagi pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo, anggaran merupakan sarana untuk keperluan rencana, koordinasi, pengawasan dan pengendalian. Untuk lebih memahami pengertian anggaran maka peneliti akan mengemukakan beberapa pendapat ahli tentang anggaran sebagai berikut: Menurut Garrison, Norren and Brewer⁹ “Anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu”. Menurut M. Nafarin¹⁰, Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu”. Menurut Herawati dan Sunarto¹¹, “Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk Menurut Munandar, pengertian anggaran yaitu:

Budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo. Yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.”

Menurut Supriyanto¹², pengertian anggaran yaitu: Budgeting menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana.”

⁹ Garrison, Norren and *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Penerbit ANDI, Yogyakarta 2007:4

¹⁰ M. Nafarin *Manajemen Keuangan*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.,2004

¹¹ Sartono,2004

¹² Supriyanto,2010

Bastian¹³ menginterpretasikan anggaran sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Sementara itu Nordiawan¹⁴ memberikan pengertian anggaran sektor publik sebagai rencana finansial yang menyatakan :

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan, serta besar pemasukan tersebut.

Selanjutnya Nordiawan¹⁵ adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocations resources to unlimited demands*). Menurut *Governmental Accounting Standar Board* anggaran (*budget*) sektor publik adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

1. Jenis Belanja

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 21 pengalokasian anggaran

belanja menurut klasifikasi ekonomi terdiri atas:

- a. Anggaran belanja Pegawai

¹³ Bastian,2011

13. wikipedia Indonesia, 2011: 1

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang atau barang diberikan kepada pegawai pemerintah (pejabat Negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus pegawai negeri sipil yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Belanja pegawai terdiri dari (a) Belanja pegawai mengikat, (b) Belanja pegawai tidak mengikat.

b. Anggaran belanja barang

Belanja barang yaitu pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Pengalokasian anggaran untuk belanja barang mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan. Sedangkan Pengalokasian anggaran yang belum ditetapkan standar biayanya dilakukan atas dasar rincian anggaran biaya yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Belanja barang terdiri dari (a) Belanja barang fisik (b) Belanja Jasa (c) Belanja pemeliharaan (d) Belanja perjalanan Dinas (e) Belanja barang non operasional (f) Belanja jasa sewa, jasa profesi dan jasa lainnya.

c. Anggaran belanja modal

Anggaran belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset kementerian Negara/lembaga dengan kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan dengan demikian belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari (a)

Belanja modal tanah (b) Belanja modal Peralatan dan mesin (c) belanja Modal gedung dan bangunan (d) Belanja Modal Peralatan dan mesin (e) Belanja modal lainnya.

d. Bunga

Bunga yaitu pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun dihitung berdasarkan posisi pinjaman.

1. Subsidi

Subsidi yaitu anggaran yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo / lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

2. Bantuan Sosial

Bantuan sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga masyarakat termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Yang termasuk bantuan sosial adalah (1) bantuan kompensasi yang transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat. (2) Bantuan kepada lembaga pendidikan dan peribadatan yaitu transfer dalam bentuk uang barang atau jasa diberikan kepada lembaga pendidikan atau lembaga keagamaan.

3. Hibah

Hibah adalah Transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib kepada Negara lain atau kepada organisasi internasional.

4. Belanja lain-lain

Yaitu jenis belanja khusus digunakan untuk kegiatan anggaran pembiayaan dan perhitungan.

2. Penerapan Pendekatan Penganggaran

Undang-undang¹⁶ Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran. Perubahan-perubahan tersebut didorong oleh beberapa faktor termasuk diantaranya perubahan yang berlangsung begitu cepat di bidang politik, desentralisasi, dan berbagai perkembangan tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah, berbagai perkembangan tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah, berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang responsif, yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam dan dampak pembangunan, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Penganggaran memiliki tiga tujuan utama stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Undang-undang¹⁷ No. 17 tahun 2004 tentang keuangan Negara disusun berdasarkan pemahaman bahwa ketiga tujuan tersebut terkait erat satu sama lain. Berbagai inisiatif yang terkandung dalam Undang-undang

¹⁶ Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran

¹⁷ Undang-undang No. 17 tahun 2004 tentang keuangan Negara disusun berdasarkan pemahaman bahwa ketiga tujuan tersebut terkait erat satu sama lain.

ini penerapan prinsip perencanaan dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja ditujukan untuk mendukung upaya mencapai tujuan tersebut, berbagai elemen tujuan penganggaran ini perlu dikelola dengan baik agar ketiganya saling mendukung.

Kebijakan fiskal yang baik dengan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah merupakan kunci bagi kepastian pandangan kegiatan pemerintah, dalam keadaan dimana dana yang tersedia sangat terbatas sedangkan kebutuhan sangat besar. Alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran tidak merongrong pencapaian tujuan fiskal dengan penerapan pagu indikatif dan pagu sementara pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran secara rinci, para pelaku anggaran pelaku anggaran harus menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan yang telah diambil pada masa lalu dan yang akan diambil pada masa yang akan datang. Proses penganggaran menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

6. Pendekatan Penganggaran Terpadu

Memuat semua kegiatan instansi pemerintah dalam APBN yang disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan merupakan tahapan yang diperlukan sebagai upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. Dalam kaitan dengan penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi pelaksanaan elemen reformasi

penganggaran lainnya, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dengan kata lain bahwa pendekatan penganggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud lebih dahulu.

Penerapan penganggaran terpadu (*unified budget*) dapat mewujudkan:

- a. Satuan kerja sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggungjawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya.
- b. Alokasi dana untuk kegiatan dasar/operasional organisasi mendukung kegiatan penunjang dan prioritas dalam rangka pelaksanaan fungsi program dan kegiatan satuan kerja yang bersangkutan.
- c. Adanya akun yang standar untuk satu jenis belanja dipastikan tidak ada duplikasi penggunaannya, sehingga satu output tertentu hanya untuk satu jenis belanja.

7. Pendekatan Sistem Penganggaran

Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sesuai pasal 7 PP nomor 21 tahun 2004 kementerian Negara/lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengaju pada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja (*performance Indicators*) dan sasaran (*Targets*) merupakan bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas dan kegiatan. Sistem ini terutama berusaha untuk

menghubungkan antara keluaran (*outputs*) dengan hasil (*outcomes*) yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan.

B. Pengertian Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN).

DIPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Bahan Konsep DIPA Antara Lain:

1. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara¹⁸.
Alokasi Anggaran dalam undang- undang APBN merupakan pagu suatu Kementerian / Lembaga yang dapat dialokasikan pada DIPA satuan kerja – satuan kerja pada Kementerian Negara / lembaga berkenaan.
2. Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagai dasar alokasi anggaran.

¹⁸ *Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*

3. RKA-KL yang telah disetujui oleh DPR, dan telah ditelaah oleh Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
4. Bagan Akun Standar.
5. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA).

Berdasarkan Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara¹⁹ dan Undang-undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara²⁰ telah digulirkan Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah yang mengakibatkan adanya perubahan fungsi yaitu dari fungsi yang menekankan pada Publik *Finansial Administration* ke fungsi Publik *Finansial Management*. Dengan perubahan fungsi tersebut terdapat pemisahan kewenangan dan implikasinya. Pemisahan kewenangan ditujukan untuk menjamin terciptanya mekanisme *check and balance* serta memperjelas akuntabilitas masing-masing pihak yaitu menteri keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah *Chief Finansial Officier* (CFO) Pemerintah Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional, sedangkan para menteri dan pimpinan lembaga negara adalah *Chief Operational Officier* (COO) yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Pembagian kewenangan yang jelas dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) antara menteri keuangan dan menteri teknis tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan terlaksananya mekanisme saling uji dalam pelaksanaan pengeluaran negara dan jaminan atas kejelasan akuntabilitas Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan

¹⁹ Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

Menteri Teknis sebagai Pengguna Anggaran. Selain itu, pembagian kewenangan ini akan memberikan fleksibilitas bagi menteri teknis sebagai pengguna anggaran kementeriannya secara efisien dan efektif dalam rangka optimalisasi kinerja kementeriannya untuk menghasilkan *output* yang telah ditetapkan.

Dengan demikian kewenangan menteri teknis akan melaksanakan Administrasi Beheer yang meliputi pembuatan komitmen, pengujian, dan pembebanan, serta perintah pembayaran, sedangkan Menteri Keuangan akan melaksanakan *Compatabel Beheer* yang meliputi pengujian dan pencairan dana.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk satuan kerja/satuan kerja semantara di lingkungan instansi PA bersangkutan dengan surat keputusan. KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran belanja negara yang dikuasakan kepadanya. Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangannya kepada KPA untuk menunjuk PPK, Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran.

Menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengangkat Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Kuasa BUN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara, tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku

BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebelum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terlebih dahulu melakukan pengujian secara substansial dan formal terhadap SPM yang diterimanya.

Sejalan dengan reformasi tersebut, Departemen Keuangan terutama unit organisasi paling terdepan seperti KPPN sebagai Kuasa BUN telah melakukan reformasi organisasi dalam rangka memperlancar pencairan APBN.

Namun demikian berdasarkan informasi yang ada sampai akhir Juni 2010 realisasi APBN masih rendah yaitu sebesar 36% dari total belanja pemerintah pusat Rp 781,5 T. Jika dibandingkan dengan semester yang sama tahun lalu, tingkat penyerapan anggaran kali ini sedikit lebih baik. Pada Januari 2009 hingga Juni 2009 penyerapan APBN hanya sekitar 31%.

Kepala Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis²¹ mengatakan minimnya pemahaman standar operasional pencairan anggaran oleh para petugas satuan kerja di K/L bisa menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Bisa juga karena proses administrasi yang berbelit-belit, juga mekanisme dan aturan tender yang tidak sederhana.

Berkenaan dengan rendahnya penyerapan anggaran negara, maka baik menteri teknis sebagai penguasa anggaran maupun menteri keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) harus mengetahui prosedur pencairan dan pengujian tagihan kepada negara.

²¹ Harry Azhar Azis (2009:43)

C. Jenis DIPA Kementerian / Lembaga

1. DIPA Satker Pusat / Kantor Pusat, dengan kode kewenangan KP.
2. DIPA Satker Daerah / Kantor Daerah, dengan kode kewenangan KD.
3. DIPA Dana Dekonsentrasi, dengan kode kewenangan DK.
4. DIPA Tugas Perbantuan, dengan kode kewenangan TP

Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, *Update* sekarang mengenai Pengertian DIPA dalam APBN, Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. Menurut PMK No 190/PMK.05/2012, Daftar Isian Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. Dimana DIPA memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN.
- b. .Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara.
- c. Pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA.
- d. Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA.

D. Faktor Penghambat Pencairan Anggaran DIPA

Pencairan Anggaran DIPA di Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Palopo sering mengalami hambatan seperti hambatan pengimputan rencana kerja melalui internet (jaringan), penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu, penyusunan rancangan operasional kegiatan 1 tahun mata anggaran tidak dibuat, aplikasi terhambat dengan jaringan, aplikasi sering berubah-ubah, dari satu kegiatan meliputi beberapa kegiatan yang harus diakses. Untuk melaksanakan strategi organisasi harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias atau penyimpangan dengan diberlakukannya Undang-undang Pengelolaan Keuangan Negara keleluasaan dalam merencanakan, menggali, mengalokasikan, mengendalikan dan mengawasi Pengelolaan Keuangan secara mandiri.

Pencairan anggaran dilakukan berdasarkan dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) atau Pencairan pertama umumnya dilakukan pada akhir triwulan pertama dan kemudian bervariasi sesuai dengan sifat dari proyek. Terdapat berbagai inkonsistensi ketika membandingkan antara rencana pencairan dengan realisasi keuangan dan antara rencana kemajuan fisik dengan realisasi kemajuan fisik. Inkonsistensi tersebut disebabkan oleh tantangan-tantangan yang telah teridentifikasi di atas selama penyusunan anggaran, pengadaan, dan pelaksanaan. Bagi proyek-proyek bukan konstruksi dan kurang dari satu tahun (yaitu proyek yang tidak melibatkan pembebasan tanah), Satker dapat mulai proses pencairan untuk uang muka di bulan Maret hingga Mei, sementara pencairan bagi proyek-proyek konstruksi dan proyek yang lebih dari satu tahun (yaitu pengadaan berskala besar dan rumit yang membutuhkan pra-kualifikasi, jaminan bank, dimulai cukup lambat pada bulan Agustus atau September. Selain itu, juga terdapat perbedaan

ketika membandingkan antara kemajuan fisik dan keuangan. Hal ini disebabkan oleh preferensi kontraktor untuk menunda penyerahan tagihan-tagihan, hingga triwulan terakhir, yang disebabkan oleh rumitnya prosedur pembayaran.

Beberapa kontraktor juga memiliki sumber daya dan kapasitas yang terbatas untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk meminta pembayaran. Selain itu, keterlambatan dalam kemajuan keuangan dibanding kemajuan fisik juga dapat disebabkan oleh keterlambatan proses di Satker. Sistem pemantauan yang jelas masih belum ada dan kurangnya dorongan untuk memantau proses penerbitan perintah pembayaran oleh Satker kepada KPPN. Selain itu, perbedaan itu juga dapat disebabkan oleh prinsip anggaran yang mengharuskan bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan setelah pembangunan dilakukan atau barang/jasa telah diterima.

Kantor Wilayah Provinsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN-KPPN di seluruh Indonesia yang mengadakan acara formal penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 kepada Satuan Kerja (Satker) mitra kerja masing-masing. Dalam acara penyerahan DIPA tersebut, Presiden RI menyatakan: "Negara dan rakyat akan dirugikan jika penggunaan APBN/ APBD tidak optimal" Selain itu dinyatakan bahwa: "Harus ada koreksi, perbaikan, dan kemungkinan sanksi yang akan dilakukan agar penyerapan anggaran lebih baik di masa depan. Dalam upaya melaksanakan APBN secara optimal, ada beberapa langkah-langkah awal yang harus dilakukan yaitu:

Keterlambatan penetapan Pejabat Perbendaharaan Satker adalah merupakan awal terlambatnya penyerapan anggaran dalam DIPA. Hal ini

selalu terulang dari tahun ke tahun. Satker yang telah menerima DIPA TA.2012, Kepala Kantor/Pejabat Berwenang selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada TA.2011 harus segera Pro Aktif menanyakan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan/Perbendaharaan Satker (Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, Pejabat Penandatangan SPM/PPSPM dan Bendahara Pengeluaran) baik itu Unit Eselon I Kementerian/Lembaga maupun Pejabat Pemerintah Daerah agar segera menerbitkan surat keputusan penetapan pejabat/pengelola perbendaharaan.

SK penetapan/penunjukan pejabat perbendaharaan satker yang telah diterbitkan, segera dikirimkan kepada KPPN setempat beserta contoh spesimen tanda tangan pejabat perbendaharaan. Format surat pemberitahuan yang berisi nama-nama pejabat beserta spesimen tanda tangannya mengikuti format yang ditentukan oleh KPPN setempat. Nama-nama pejabat dan spesimen tersebut menjadi dasar KPPN untuk memproses SPM dari Satker, bila tidak sesuai maka SPM akan dikembalikan yang berakibat pada terhambatnya penyerapan anggaran.

Kuasa Pengguna Anggaran yang telah ditunjuk oleh pejabat berwenang harus menunjuk petugas yang akan berhubungan dengan KPPN sesuai dengan persyaratan dalam PER-41/PB/2011 untuk mendapatkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS).

Pegawai Satker yang bukan merupakan PNS/CPNS (tenaga Honorer) tidak dapat diajukan menjadi Petugas Satker kecuali mendapatkan dispensasi dari Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai prosedur yang diatur dalam PER-41/PB/2011. KPPN tidak akan melayani SPM Satker yang dibawa oleh Petugas yang tidak terdaftar sebagai petugas satker di KPPN

ataupun Petugas Satker yang telah terdaftar namun tidak dapat menunjukkan KIPS yang diterbitkan KPPN. DIPA TA.2012 yang telah diterima bisa jadi memiliki kekeliruan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Satker. Satker agar meneliti DIPA dimaksud untuk memastikan tidak adanya kendala / kesalahan /kekeliruan. Kendala /kesalahan / kekeliruan yang sering terjadi antara lain: perbedaan antara data kode dalam DIPA dengan ADK Pagu, kesalahan pembebanan akun (sering terjadi pada akun 521213, 521115), anggaran yang diblokir, dan lain sebagainya. Satker dapat membandingkannya dengan Penyelenggaraan Operasional Kegiatan (POK) dan peraturan-peraturan perbendaharaan (pembayaran kegiatan-kegiatan tertentu dan akun-akun tertentu.

Akun Baru dalam DIPA TA.2012. Satker harus memperhatikan bahwa terjadi beberapa perubahan akun yang cukup penting dalam DIPA 2012. Satker agar memperhatikan PER-80/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun pada Bagan Akun Standar. Bila menemui kendala/kesalahan/ketidak sesuaian yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, segera lakukan revisi dan berkoordinasi dengan KPPN maupun Kanwil DJPB Provinsi setempat.

Secara umum aplikasi-aplikasi perbendaharaan 2012 tidak jauh berbeda dengan 2011. Namun dengan adanya beberapa perubahan dalam DIPA 2012 mengakibatkan terjadinya perubahan dalam aplikasi-aplikasi perbendaharaan 2012. Tidak perlu kuatir terhadap permasalahan aplikasi. Satker dapat menghubungi KPPN setempat untuk meminta bantuan teknis terkait aplikasi-aplikasi. KPPN telah menyediakan petugas yang ditunjuk untuk menangani permasalahan aplikasi-aplikasi 2012. Selain itu KPPN akan

mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi-aplikasi 2012 khususnya aplikasi SPM 2012. Satker agar menunjuk Petugas Satker yang menangani/menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut agar dapat lebih menguasai dan memahami teknis penggunaannya. Setelah Pejabat Perbendaharaan, Petugas Satker memiliki KIPS, Aplikasi SPM 2012 dan aplikasi-aplikasi lainnya telah siap, maka Satker dapat mulai mengajukan pencairan dana berdasarkan DIPA 2012 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Hal yang lumrah dalam awal tahun anggaran biasanya adalah Satker mengajukan SPM Uang Persediaan (UP) kepada KPPN sebagai penyediaan uang di kas bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan satker yang tidak dapat dilaksanakan/tidak memungkinkan dengan SPM LS (Langsung). Besarnya Uang Persediaan masing-masing satker telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (PER-11/PB/2011) berdasarkan pagu DIPA Satker.

Sistem dalam Aplikasi SPM 2012 juga telah membatasi maksimal UP yang bisa diambil oleh masing-masing satker. UP yang cair belum membebani APBN, dan akan membebani APBN saat satker mengajukan SPM-GUP (Ganti Uang Persediaan/GU Isi). Pengajuan SPM-GUP yang mensyaratkan 75% penggunaan UP bukan berarti satker boleh tidak menggunakan UP tersebut. Satker tetap berkewajiban menggunakan UP tersebut seoptimal/secepat mungkin agar terjadi realisasi anggaran, bila tidak maka keuangan Negara berpotensi mengalami kerugian karena adanya uang mengangur di kas bendahara pengeluaran. Selain uang persediaan, satker sangat dianjurkan untuk melakukan pencairan dana DIPA melalui SPM-LS untuk mempercepat realiasi anggaran.

Satker agar menginventarisir kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan baik berhubungan dengan belanja barang maupun belanja modal. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan lebih cepat di awal tahun anggaran agar jangan ditunda-tunda, terutama kegiatan pembangunan fisik yang memerlukan waktu lebih panjang dalam persiapan. berupa pelelangan barang/jasa hingga pelaksanaan pekerjaan. Waktu satu Tahun Anggaran seharusnya cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sejak TA. 2011. Kemauan, komunikasi dan koordinasi adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan demi terlaksananya pelaksanaan anggaran yang optimal, tepat waktu, efektif dan efisien.

Idealnya penyerapan anggaran adalah kecil di awal tahun makin membesar hingga mencapai puncaknya di triwulan III karena pekerjaan banyak yang telah mulai selesai dan mengecil kembali di triwulan IV hingga akhir tahun anggaran karena semua kegiatan telah dilaksanakan. Bagi Satker yang sampai triwulan I penyerapan anggarannya belum mencapai 20-25% perlu mengambil langkah-langkah lebih serius dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya agar penyerapan anggaran dapat dilakukan merata sepanjang tahun anggaran. Dengan demikian diharapkan APBN dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menggerakkan perekonomian dan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Presiden RI di awal tahun anggaran 2012 saat menyerahkan DIPA kepada Menteri, Pimpinan Lembaga dan Gubernur se-Indonesia.

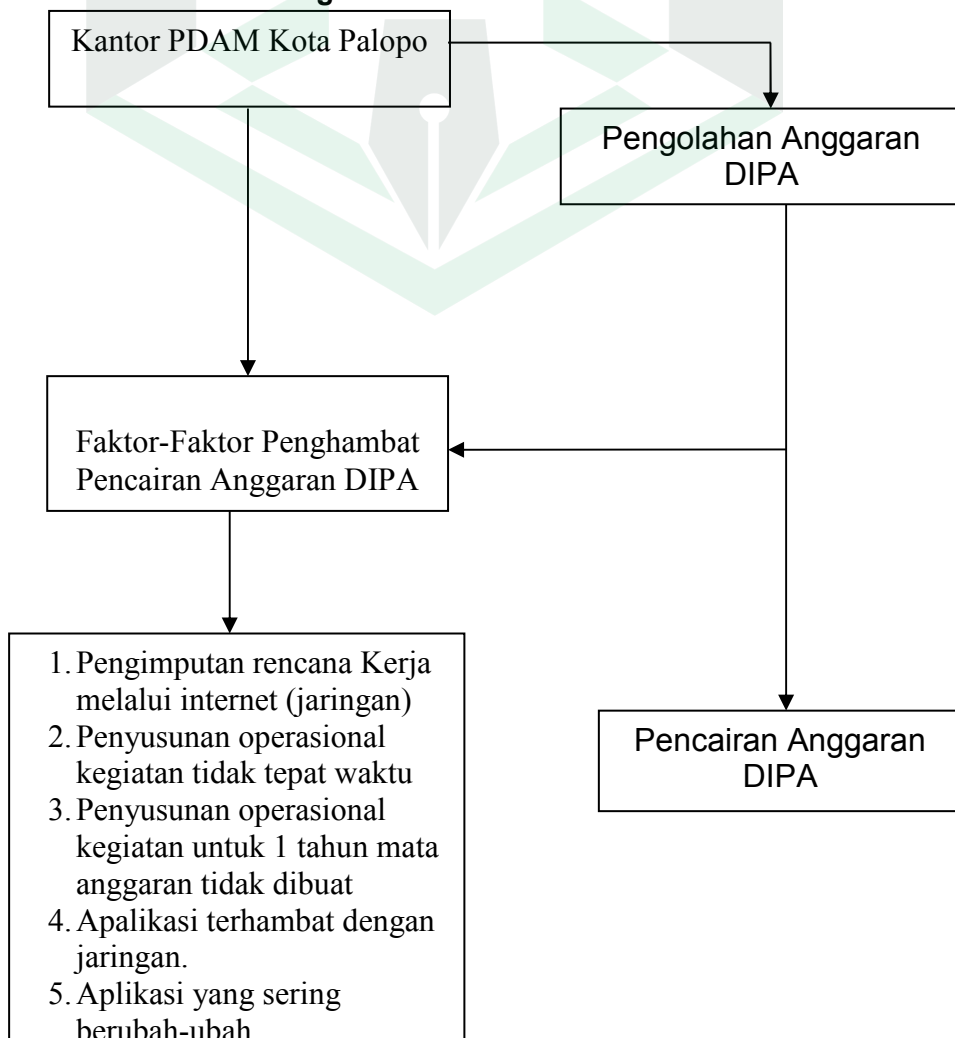
E. Kerangka Pikir

Anggaran DIPA yang disebabkan oleh keterlambatan dalam proses awal pelaksanaan, keterlambatan Satker dalam proses pembayaran, dan

preferensi dari banyak kontraktor untuk menyampaikan tagihan-tagihan pembayaran menjelang akhir tahun. Pencairan pertama umumnya dilakukan pada akhir triwulan pertama dan kemudian bervariasi sesuai dengan sifat dari proyek. Inkonsistensi tersebut disebabkan oleh tantangan yang telah teridentifikasi di atas selama penyusunan anggaran, pengadaan, dan pelaksanaan.

Penganggaran memiliki tiga tujuan utama stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara disusun berdasarkan pemahaman bahwa ketiga tujuan tersebut terkait erat satu sama lain. Berbagai inisiatif yang terkandung dalam Undang-undang ini penerapan prinsip perencanaan dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran.

Gambar 2.1 **Skema Kerangka Pikir**



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan penelitian kuantitatif yang bersifat analisis deskriptif yaitu mengumpulkan, menyusun data mendeskripsikan berbagai dokumen, data dan informasi yang aktual, sehingga peneliti dapat memberikan kesimpulan pada penelitian ini.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan sosiologis, yaitu dengan memerlukan sasaran secara pasif menyusun secara aktif dunia sosial mereka.
2. Pendekatan Psikologis, yaitu adanya penjiwaan terhadap pegawai yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo.

C. Informan / Subjek Penelitian

Yang menjadi informan Penelitian ini dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo dengan subjek penelitian direktur PDAM Kota Palopo dan pegawai tetap.

D. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, adalah data yang di peroleh melalui hasil penelitian langsung terhadap obyek yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui metode observasi dan hasil wawancara langsung dan mendalam terhadap Anggaran DIPA pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari dokumentasi/tulisan (buku-buku, laporan-laporan, karya ilmiah dan hasil penelitian) dan dari informasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kajian yang di teliti.

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo yang jumlahnya sebanyak 20 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik sampel mengambil

dari keseluruhan jumlah populasi dengan pertimbangan semua anggota populasi dijadikan sampel 20 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data dalam penelitian ini di maksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang di bahas.

Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Observasi** Metode ini dipergunakan sebagai salah satu piranti dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.
- b. Wawancara (Interview)** yaitu dilakukan terhadap jumlah responden yang di anggap dapat memberikan yang di butuhkan didalam penelitian ini
- c. Dokumentasi** adalah data yang di peroleh melalui pencatatan – pencatatan dari dokumen – dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian
- d. Angket** adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara tertulis yang diberikan kepada responden dengan maksud untuk memperoleh data yang akurat dan valid.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan maka digunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Analisis secara deskriptif mengenai Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pencairan Anggaran DIPA pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo.
2. Analisis kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda dengan rumus menurut Sugiyono (2010: 34) sebagai berikut:

Analisis ini digunakan untuk menguji Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pencairan Anggaran DIPA pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo. Perhitungan akan dilakukan dengan bantuan program *SPSS 18 for Windows*

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e_i$$

Keterangan:

- Y = Pencairan anggaran DIPA
- X₁ = Penginputan rencana Kerja melalui internet.
- X₂ = Penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu
- X₃ = Penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dbuat
- X₄ = Aplikasi terhambat dengan jaringan
- X₅ = Aplikasi yang sering berubah-ubah.
- b₁-b₅ = Koefisien Regresi dari variabel x
- b₀ = Konstanta (Intercept)
- e_i = Faktor kesalahan

2. Perhitungan koefisien korelasi (R)

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui kuatnya pengaruh antara variabel bebas dan tidak bebas. Semakin besar nilai r maka semakin tepat model regresi yang dipakai karena total variasi dapat menjelaskan variabel tidak bebas. Sebagai pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi yang dihasilkan, digunakan tabel menurut Sugiyono (2009:231).

1. Karakteristik Responden

Deskripsi Karakteristik responden adalah penjelasan tentang penghambat pencairan anggaran DIPA pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo, yang diperlukan sebagai informasi untuk mengetahui identitas responden dalam penelitian ini. Responden sebagai obyek penelitian yang memberikan interpretasi terhadap karakteristik responden untuk menganalisis penghambat pencairan anggaran DIPA pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penyediaan air bersih di Kabupaten Luwu khususnya Kota Palopo dimulai sejak tahun 1941 yaitu masa pemerintahan Kolonial Belanda dengan pengambilan sumber air baku di sungai Mangkaluku Desa Murante Kecamatan Wara dengan status "Unit Pelayanan Air Minum". Pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1980 dilakukan dengan rehabilitasi pada instalasi tersebut oleh Proyek Peningkatan Prasarana Air Bersih Sulawesi Selatan. Sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 128/KPTS/CK/XII/1980 tanggal 12 Desember 1980, maka Unit Pelayanan Air Minum bersih status menjadi badan pengelola Air minum (BPAM) Kabupaten Luwu dimana secara efektif beroperasi tahun 1981 dengan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan – kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengurusan sarana penyediaan air minum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan .
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Luwu dan sekitarnya dalam hal penyediaan air minum yang sehat .
3. Dijadikan suatu badan yang akan dikembangkan lebih lanjut menjadi salah satu bentuk usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu nomor 12 tahun 1985 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 66/KPTS/1991 tanggal 02 Desember 1991 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Air Bersih di Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, maka pada tanggal 09 Desember 1991 Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Luwu dialihstatuskan menjadi Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Luwu Dengan Berita Acara Penyerahan Pengelolaan dari Ditjen Cipta Karya yang diwakili oleh Direktur Air Bersih kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang di Wakili oleh Wakil Gubernur, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Pelayanan umum/jasa
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum
3. Memupuk pendapatan

Dengan Keputusan Bupati Luwu No. 02 Tahun 2004 tanggal 02 Januari 2004 kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Kepada Pemerintah Kota No. 539/008/HUK/2004 tanggal 09 Januari 2004 tentang Penyerahan Pengelolaan PDAM Kabupaten Luwu yang berada di Wilayah Kota Palopo Kepada Perintah Kota Palopo, maka PDAM Kabupaten Luwu telah resmi menjadi PDAM Kota Palopo sesuai Peraturan Daerah Kota Palopo NO.8 Tahun 2005 tentang Pendirian PDAM Kota Palopo Dengan fungsi ;

1. Tujuan perusahaan adalah turut serta melaksanakan :
 - a. Perusahaan Khususnya.
 - b. Pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2. Perusahaan mengusahakan penyediaan air minum dan yang sehat dan syarat-syarat bagi pemanfaatan umum.
3. Perusahaan dapat mengembangkan jenis usaha.

1. Visi dan Misi

b. Visi

Agar mampu eksis dan unggul memberikan pelayanan kepada konsumen dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka PDAM kota Palopo harus terus menerus dalam melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang optimal. Visi dan misi PDAM Kota Palopo tahun 2007 mengalami perubahan sesuai dinamika dan perkembangan perusahaan juga mensinkronkan dengan visi di Kota Palopo.

c. Misi

Misi perusahaan merupakan suatu yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan perusahaan dapat dicapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi perusahaan diharapkan seruh pegawai dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengenal PDAM dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu-waktu yang akan datang. Untuk misi perusahaan sebagai berikut :

1. Mengutamakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan air minum secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia

3. Melestarikan sumber air.

2. Organisasi

1. Badan Pengawasan

Susunan Badan Pengawasan PDAM Kota Palopo tahun 2007 berdasarkan SK Walikota Palopo No. 48/II/2014 dan Nomor: 49/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Pembina : Drs. Yudas Amir, MH
2. Ketua merangkap anggota : Drs. Syamsul Rijal Syam, MM(pemerintah)
3. Sekretaris merangkap anggota: Drs.Sunandar Latief (profesional)
4. Anggota : Khaerul Baderu (pelanggan)

2. Direktur

Direktur PDAM Kota Palopo adalah H. Yasir, S.E, MM. Akt Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 31/II/2011 tanggal 17 januari 2011.

Susunan organisasi dan tata kerja PDAM Kota Palopo ditetapkan dengan peraturan Walikota Palopo No. 24 tahun 2011 tanggal 26 September 2011 adalah sebagai berikut :

- Direktur
- Bagan Adm & Keuangan :
 1. Sub Bagian SDM
 2. Sub Bagian Umum
 3. Sub Bagian Akuntansi
 4. Sub Bagian Kas
 5. Sub Bagian Logistik
- Kabag Hubungan Langgan :

1. Sub Bagian Pelayanan
 2. Sub Bagian Rekening
 3. Sub Bagian Penagihan
 4. Sub Bagian Pечатatan Meter
 5. Sub Bagian Pengaduan
- Kabag Teknik :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Produksi
 3. Sub Bagian Laboraturium
 4. Sub Bagian Distribusi
 5. Sub Bagian Perawatan

4. Gambaran Umum

Aktifitas PDAM kota palopo mulai dari asset/sumber air yang digunakan dengan memanfaatkan sungai jumlah pegawai yang terdiri dari 15 orang/item dapat dilihat pertabel 4.1 seperti dibawa ini.

Tabel 4.1
Gambaran umum aktifitas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket.
1.	Sumber air utama			Sungai
2.	Kapasitas Bangunan Sumber	lt/dt	532,50	
3.	Kapasitas Terpasang/Pngolahan	lt/dt	422,50	
4.	Kapasitas produksi	lt/dt	422,50	Grafitas & pompa
5.	Panjang Jaringan Pipa	mtr	268.275	
6.	Sistem Pembayaran			
7.	Jumlah penduduk Kota Plp	Jiwa	142.548	
8.	Jumlah produk terlayani	jiwa	95.748	
9.	Pertumbuhan penduduk/thn	%	3,47	
10.	Prosentase pelayanan	%	67,17	
11	Jumlah pelanggan (non HU)	Unit	14,158	
12.	Jumlah pelanggan HU	Unit	108	

13	Tarif dasar A	Rp	2.000	
14.	Biaya sumbangan (rata-rata)	Rp	1.400.0	
15.	Jumlah badan pegawai	Org	110	

Sumber: Data PDAM Kota Palopo, April 2014

Responden dalam penelitian ini sebanyak 20 orang pegawai yang representatif untuk dikemukakan sebagai kelayakan responden dalam memberikan informasi berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan masa kerja. Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden terdiri dari atas laki-laki dan perempuan guna mengetahui proporsi dari pegawai yang bekerja pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Frekuensi dan Persentase Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Laki – laki	12	60
Perempuan	8	40
Jumlah	20	100

Sumber : Data Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jenis kelamin responden yang paling banyak adalah laki - laki sebanyak 12 orang atau 60% dari 20 responden dan perempuan sebanyak 8 orang atau 40%. Kecenderungan penggunaan sumber daya laki – laki menjadi karakteristik tersendiri disebabkan karena beban kerja dan wilayah kerja lebih banyak menggunakan faktor fisik. Untuk lebihnya dapat dilihat Gambar Pie pada Tabel 4.1 berikut:



Gambar 4.1
Pie Jenis Kelamin

Sumber: Data Tabel 4.1 di atas

b. Umur

Umur responden yang dimaksud adalah usia dari Pegawai pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo. Umur sangat erat hubungannya dengan pencapaian kinerja Pegawai, terutama usia produktif yang sangat berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan.

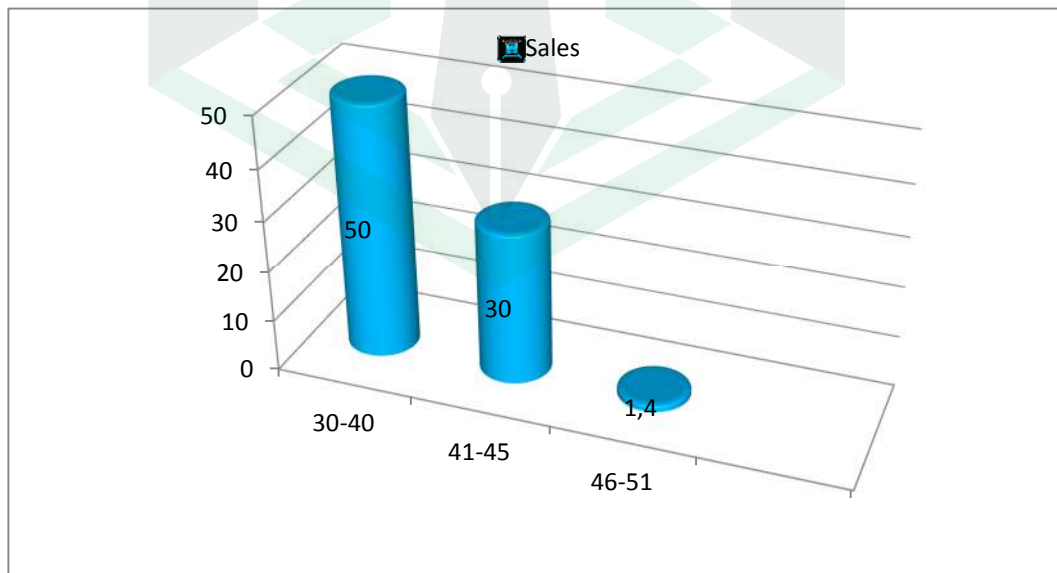
Umur responden diintervalkan mulai dari umur yang termuda sampai yang tua, yang dapat memperlihatkan adanya variasi dalam kelompok umur sehingga memberikan karakteristik Pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Frekuensi dan Persentase Karakteristik Umur Responden

No.	Umur (Tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	30 –40	10	50
2	41– 45	6	30
3	46 – 51	4	20
Jumlah		20	100

Sumber : Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa umumnya Pegawai pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo bervariasi mulai dari kelompok usia 30 – 40 tahun sampai dengan 46-51 tahun. Pegawai kebanyakan berusia antara 30 - 40 tahun yaitu sebanyak 10 orang atau 50%, 41-45 tahun sebanyak 6 orang dan 46-51 sebanyak 4 atau 20% dari keseluruhan responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar Pie berikut:



Gambar 4.2
Pie Umur Responden

Sumber: Data Tabel 4.2 di atas

c. Pendidikan

Pendidikan adalah jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki oleh responden sesuai dengan latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu yang ditekuni dan diakui oleh pemerintah atas tamatan pendidikan yang dimilikinya. Tingkat pendidikan mempunyai andil dalam mendukung aktivitas kerja sehari-hari sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan penilaian kinerja Pegawai.

Pendidikan terakhir yang dimiliki responden dengan latar belakang pendidikan yang relatif bervariasi mulai SMA, S1 dan S2 yang dapat dibuktikan dengan ijazah terakhir yang dimiliki oleh masing-masing responden tersebut.

Ada pendidikan yang diperoleh sebelum dan setelah mereka bekerja sebagai Pegawai namun kesemuanya itu diperoleh melalui jenjang pendidikan formal dan diakui oleh pemerintah. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Frekuensi dan Persentase Karakteristik Pendidikan Responden

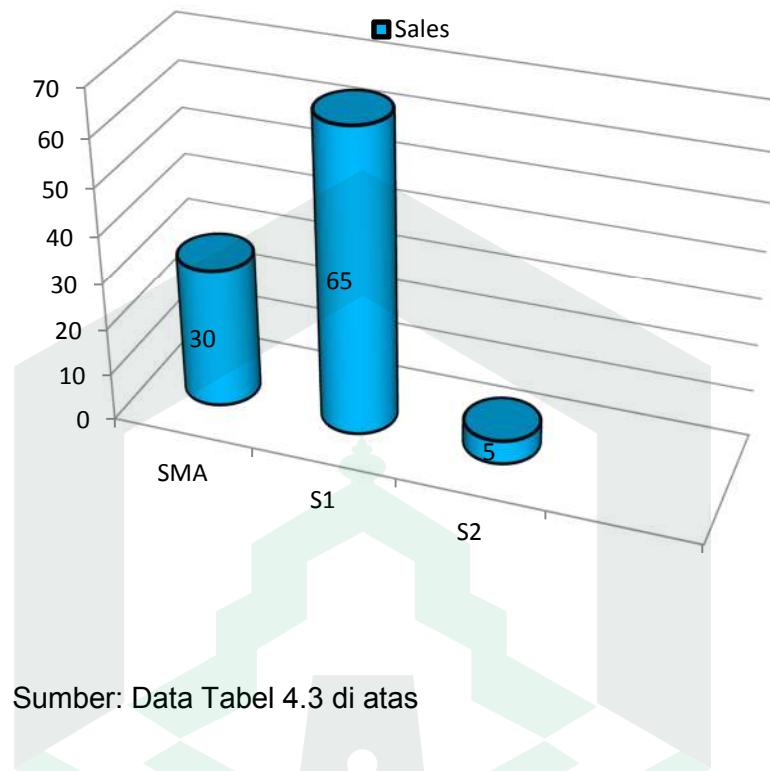
No.	Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	SMA	6	30
2	S1	13	65
3	S2	1	5
Jumlah		20	100

Sumber : Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa semua jumlah sebaran jenjang pendidikan yang paling banyak dimiliki Pegawai yaitu SMA sebanyak 10 orang atau 33%, jenjang pendidikan S1 sebanyak 12 orang atau 40% dan S2

sebanyak 8 orang atau 27%, dari keseluruhan responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar Pie berikut:

Gambar 4.3
Pie Pendidikan responden



B. Hasil Penelitian

Pengaruh Faktor-Faktor Penghambat Pencairan Anggaran DIPA pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1. Pengimputan rencana kerja melalui internet.

Berdasarkan hasil analisis data menjelaskan bahwa Pengimputan rencana kerja melalui internet (jaringan) adalah sering mengalami permasalahan, menyebabkan penghambatan pencairan anggaran DIPA pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

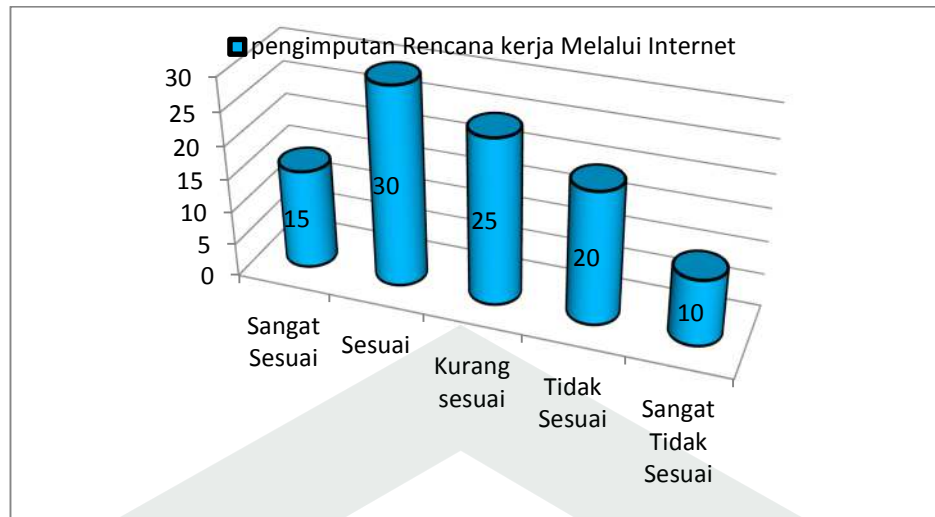
Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi dan Persentase Tentang Pengimputan rencana kerja melalui internet

No	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Sesuai	3	15
2	Sesuai	6	30
3	Kurang Sesuai	5	25
4	Tidak Sesuai	4	20
5	Sangat Tidak Sesuai	2	10
6	T o t a l	20	100

Sumber: Olahan data Primer, 2014

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil skor tanggapan responden mengenai Pengimputan rencana kerja melalui internet pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo terlihat dominan menyatakan sangat sesuai sebanyak 3 orang atau 15% dari keseluruhan responden, yang menyatakan sesuai sebanyak 6 orang atau 30%, yang menyatakan kurang sesuai sebanyak 5 orang atau 25% dan menyatakan tidak sesuai sebanyak 4 orang atau 20% dan yang menyatakan sangat tidak sesuai sebanyak 2 orang atau 10%. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengimputan rencana kerja melalui internet pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pencairan anggaran DIPA. Untuk lebih dapat dilihat pada Gambar Pie berikut:

Gambar 4.4
Pie Pengimputan rencana kerja melalui internet



Sumber: Data Tabel 4.4 di atas

2. Penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu

Penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu sehingga menyebabkan pencairan anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tidak tepat waktu pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi dan Persentase Tentang Penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu

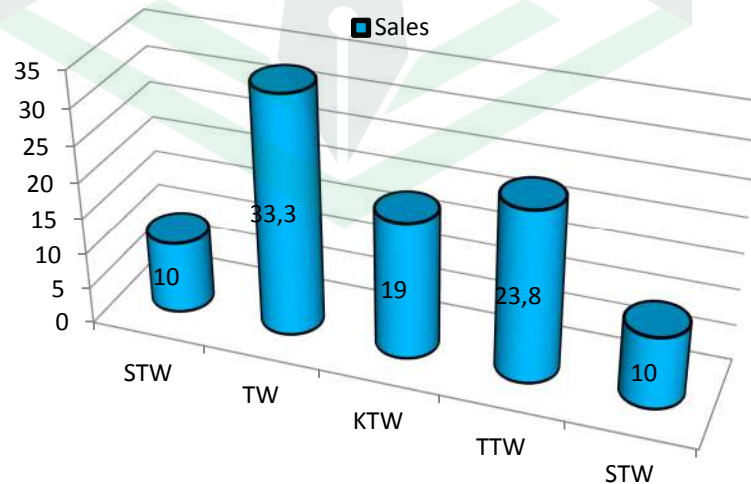
No	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Tepat Waktu	2	10
2	Tepat Waktu	7	33,3
3	Kurang Tepat waktu	4	19,0
4	Tidak tepat Waktu	5	23,8
5	Sangat Tidak Tepat Waktu	2	10
6	Total	20	100

Sumber: Olahan data Primer, 2014

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil skor tanggapan responden mengenai Penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo terlihat dominan menyatakan sangat tepat waktu sebanyak 2 orang atau 9,52% dari keseluruhan responden, yang menyatakan tepat waktu sebanyak 7 orang atau 33,3%, yang menyatakan kurang tepat waktu sebanyak 4 orang atau 19% dan menyatakan tidak tepat waktu sebanyak 5 orang atau 23,8% dan yang menyatakan sangat tidak waktu sebanyak 2 orang atau 13%. Maka dapat disimpulkan bahwa Penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pencairan anggaran DIPA. Untuk lebih dapat dilihat pada Gambar Pie berikut:

Gambar 4.5
Pie Penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu

Sumber: Data Tabel 4.5 di atas



3. Penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dibuat.

Penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dibuat sehingga menyebabkan anggaran DIPA tidak dicairkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

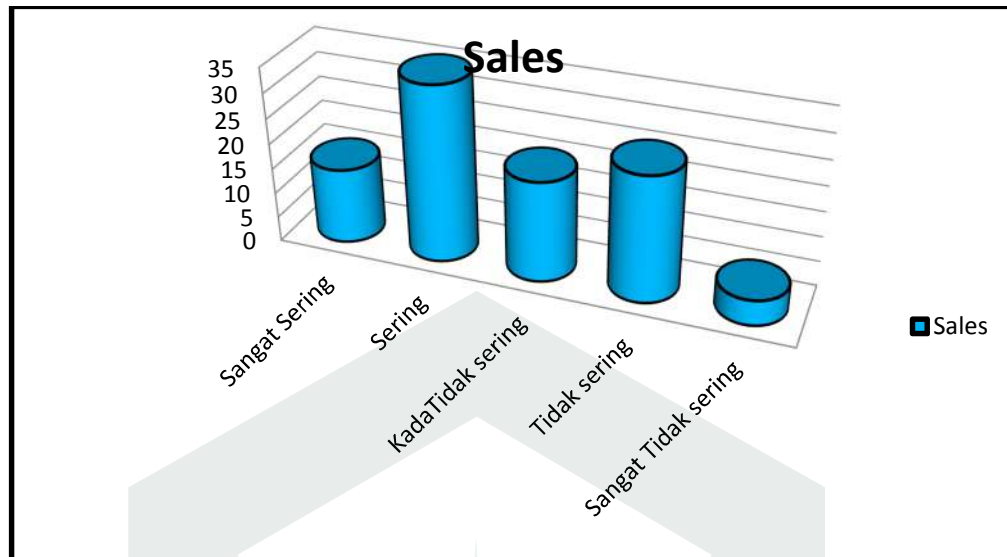
Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi dan Persentase Penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dibuat

No	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Sering	3	15
2	Sering	7	35
3	Kadang Sering	4	20
4	Tidak Sering	5	25
5	Sangat Tidak Sering	1	5
6	T o t a l	20	100

Sumber: Olahan data Primer, 2014

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil skor tanggapan responden mengenai Penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dibuat pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo terlihat dominan menyatakan sangat sering sebanyak 3 orang atau 15% dari keseluruhan responden, yang menyatakan sering sebanyak 7 orang atau 35%, yang menyatakan kadang sering sebanyak 4 orang atau 20%, menyatakan tidak sering sebanyak 5 orang atau 25% dan yang menyatakan sangat tidak sering sebanyak 1 orang atau 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa Penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dibuat pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pencairan anggaran DIPA. Untuk lebih dapat dilihat pada Gambar Pie berikut:

Gambar 4.8
Pie Penyusunan operasional kegiatan untuk
1 tahun mata anggaran tidak dibuat



Sumber: Data Tabel 4.8 di atas

4. Apalikasi Terhambat dengan jaringan yang tidak baik

Apalikasi Terhambat dengan jaringan yang tidak baik sehingga menghambat pencairan anggaran DIPA pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

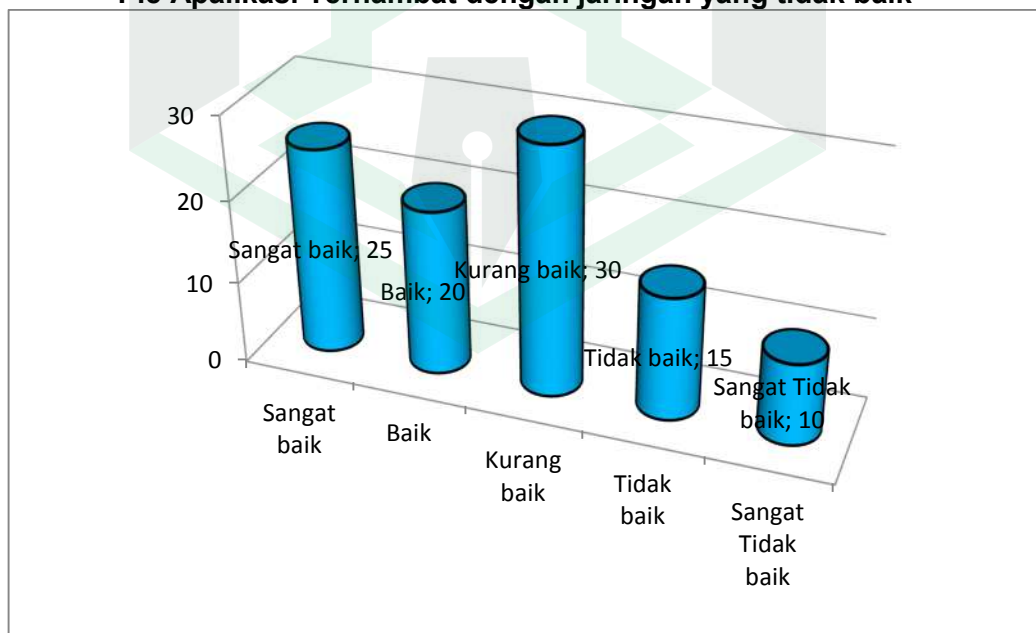
Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi dan Persentase Apalikasi
Terhambat dengan jaringan yang tidak baik

No	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Baik	5	25
2	Baik	4	20
3	Kurang Baik	6	30
4	Tidak Baik	3	15
5	Sangat Tidak Baik	2	10
6	Total	20	100

Sumber: Olahan data Primer, 2014

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil skor tanggapan responden mengenai Apalikasi Terhambat dengan jaringan yang tidak baik pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo terlihat dominan menyatakan sangat baik sebanyak 5 orang atau 25% dari keseluruhan responden, yang menyatakan baik sebanyak 4 orang atau 20%, yang menyatakan kurang baik sebanyak 6 orang atau 30%, menyatakan tidak baik sebanyak 3 orang atau 15% dan yang menyatakan sangat tidak baik sebanyak 2 orang atau 10%. Maka dapat disimpulkan bahwa Apalikasi, Terhambat dengan jaringan yang tidak baik pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pencairan anggaran DIPA. Untuk lebih dapat dilihat pada Gambar Pie berikut:

Gambar 4.6
Pie Apalikasi Terhambat dengan jaringan yang tidak baik



Sumber: Data Tabel 4.6 di atas

5. Aplikasi yang sering berubah-ubah.

Aplikasi yang sering berubah-ubah sehingga menyebabkan pencairan anggaran DIPA terlambat dicairkan pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

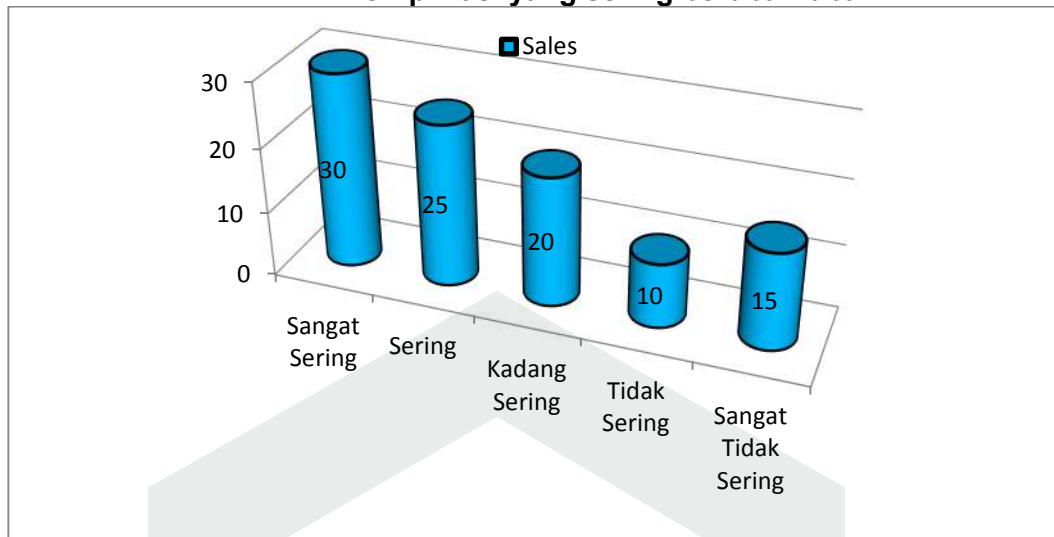
Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi dan Persentase
Aplikasi yang sering berubah-ubah

No	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Sering	6	30
2	Sering	5	25
3	Kadang Sering	4	20
4	Tidak Sering	2	10
5	Sangat Tidak Sering	3	15
6	T o t a l	20	100

Sumber: Olahan data Primer, 2014

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil skor tanggapan responden mengenai Aplikasi yang sering berubah-ubah pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo terlihat dominan menyatakan sangat sering sebanyak 6 orang atau 30% dari keseluruhan responden, yang menyatakan sering sebanyak 5 orang atau 25%, yang menyatakan kadang sering sebanyak 4 orang atau 20%, menyatakan tidak sering sebanyak 2 orang atau 10% dan yang menyatakan sangat tidak sering sebanyak 3 orang atau 15%. Maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang sering berubah-ubah pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pencairan anggaran DIPA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar Pie berikut:

Gambar 4.7
Pie Aplikasi yang sering berubah-ubah



Sumber: Data tabel 4.7 di atas

Setelah data-data yang ada terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data, data-data diolah melalui persamaan regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS, maka didapatkan hasil cetakan dalam bentuk tabel dan diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut ini:

Tabel 4.9
Regresi Linier Berganda.

variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	sig	Keterangan
X1	4,053	3,185	0,003	Signifikan
X2	7,008	7,247	0,000	Signifikan
X3	5,223	4,592	0,002	Signifikan
X4	8,138	9,439	0,000	Signifikan
X5	6,120	5,537	0,001	Signifikan

B⁰	3,951
R	0,939
R²	0,881
Adjusted R Square	280
Uji F	342,169

Sumber hasil olahan data SPSS Versi 18.00.

Berdasarkan data pada Tabel 4.9 di atas, maka didapatkan hasil cetakan yang diformulasikan dalam bentuk persamaan linier berganda sebagai berikut ini:

$$Y = 3,951 bo + 4,053 X_1 + 7,008 X_2 + 5,223X_3 + 8,138X_4 + 6,120X_5$$

Ini menunjukkan bahwa:

- a. Pengaruh pengimputan rencana kerja melalui internet (X1) terhadap pencairan anggaran DIPA (Y) adalah sebesar 4,053, maka dapat disimpulkan pengaruh antara variabel pengimputan rencana kerja melalui internet terhadap pencairan anggaran DIPA adalah kuat dan positif dengan tingkat pengaruh sebesar 40,53% dengan asumsi bahwa X2,X3,X4 dan X5 adalah konstan.
- b. Pengaruh penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu (X2) terhadap pencairan anggaran DIPA (Y) adalah sebesar 7,008, maka dapat disimpulkan pengaruh antara variabel Pengaruh penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu terhadap pencairan anggaran DIPA adalah kuat dan positif dengan tingkat pengaruh sebesar 70,08% dengan asumsi bahwa X1, X3, X4, dan X5 adalah konstan.
- c. Pengaruh Aplikasi terhambat dengan jaringan (X3) terhadap pencairan anggaran DIPA (Y) adalah sebesar 5,223, maka dapat disimpulkan pengaruh antara variabel aplikasi terhambat dengan jaringan terhadap

- pencairan anggaran DIPA adalah kuat dan positif dengan tingkat pengaruh sebesar 52,23% dengan asumsi bahwa X1, X2, X4 dan X5 adalah konstan
- d. Pengaruh aplikasi yang sering berubah-ubah (X4) terhadap pencairan anggaran DIPA (Y) adalah sebesar 8,138, maka dapat disimpulkan pengaruh antara variabel aplikasi yang sering berubah-ubah terhadap pencairan anggaran DIPA adalah kuat dan positif dengan tingkat pengaruh sebesar 81,38% dengan asumsi bahwa X1, X2, X3, dan X5 adalah konstan.
- e. Pengaruh penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak buat (X5) terhadap pencairan anggaran DIPA (Y) adalah sebesar 6,120, maka dapat disimpulkan pengaruh antara variabel penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak buat terhadap pencairan anggaran DIPA adalah kuat dan positif dengan tingkat pengaruh sebesar 61,20% dengan asumsi bahwa X1, X2, X3, dan X4 adalah konstan.
- f. Koefisien korelasi berganda (multiple R) diperoleh nilai 0.939 atau mendekati angka 1. hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas pengimputan rencana Kerja melalui internet (X1), penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu (X2), aplikasi terhambat dengan jaringan (X3), aplikasi yang sering berubah-ubah (X4) dan Penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dbuat (X5) mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pencairan anggara DIPA (Y)
- g. Koefisien determinasi (R squared) sebesar 0.881 ini berarti bahwa besarnya sumbangan kelima variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 88,1% dengan kata lain terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara kelima variabel bebas terhadap pencairan anggaran DIPA (Y).

- h. Koefisien parsial (Adjusted R squared) sebesar 0.280 terhadap variabel Y adalah 28%.
- i. Uji-F dapat dilihat pada tingkat kepercayaan sebesar 95% secara statistik* menunjukkan uji-t dari masing-masing variabel independen yaitu Pengimputan rencana Kerja melalui internet., Penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu, Apalikasi terhambat dengan jaringan, Aplikasi yang sering berubah-ubah dan Penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dbuat secara bersama-sama atau simultan sangat signifikan terhadap pencairan anggaran DIPA (Y) yaitu sebesar 342,169 dengan tingkat signifikan : 0.000
- j. Uji-t, dapat dilihat pada tingkat kepercayaan sebesar 95% secara statistik menunjukkan uji-t dari masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikan sebagai berikut:

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara parsial, dapat dilakukan uji t, uji-t bermakna jika $p < 0,05$.

1. Hasil perhitungan uji t-hitung vaiabel pengimputan rencana kerja melalui internet (X1) menunjukkan nilai sebesar 3,185 dengan tingkat signifikansi 0,05 pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, maka variabel pengimputan rencana kerja melalui internet (X1) dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel pencairan anggaran DIPA (Y) dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa secara parsial variabel bahwa pengimputan rencana kerja internet berpengaruh signifikan terhadap pencairan anggaran DIPA pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum

Kota Palopo dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian H_a diterima, karena $p = 0,003$ atau $p < 0,05$.

2. Hasil perhitungan uji t-hitung variabel penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu (X_2) menunjukkan nilai sebesar 7,247 dengan tingkat signifikansi 0,05 pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, maka variabel penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu (X_1) dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel pencairan anggaran DIPA (Y) dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa secara parsial variabel bahwa penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu berpengaruh signifikan terhadap pencairan anggaran DIPA pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian H_a diterima, karena $p = 0,000$ atau $p < 0,05$.
3. Hasil perhitungan uji t-hitung variabel aplikasi terhambat dengan jaringan (X_3) menunjukkan nilai sebesar 4,595 dengan tingkat signifikansi 0,002 pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, maka variabel aplikasi terhambat dengan jaringan (X_3) dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel pencairan anggaran DIPA (Y) dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa secara parsial variabel bahwa aplikasi terhambat dengan jaringan berpengaruh signifikan terhadap pencairan anggaran DIPA pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian H_a diterima, karena $p = 0,02$ atau $p < 0,05$.

4. Hasil perhitungan uji t-hitung variabel aplikasi yang sering berubah-ubah (X4) menunjukkan nilai sebesar 9,439 dengan tingkat signifikansi 0,000 pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, maka variabel aplikasi yang sering berubah-ubah (X4) dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel pencairan anggaran DIPA (Y) dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa secara parsial variabel aplikasi sering berubah-ubah berpengaruh signifikan terhadap pencairan anggaran DIPA pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian H_a diterima, karena $p = 0,000$ atau $p < 0,05$.
5. Hasil perhitungan uji t-hitung variabel penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dibuat (X5) menunjukkan nilai sebesar 9,439 dengan tingkat signifikansi 0,003 pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, maka variabel penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dibuat (X5) dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel pencairan anggaran DIPA (Y) dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa secara parsial variabel penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dibuat berpengaruh signifikan terhadap pencairan anggaran DIPA pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian H_a diterima, karena $p = 0,001$ atau $p < 0,05$.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengaruh pengimputan rencana kerja melalui internet (X1) terhadap pencairan anggaran

DIPA (Y) adalah sebesar 4,053, maka dapat disimpulkan pengaruh antara variabel pengimputan rencana kerja melalui internet terhadap pencairan anggaran DIPA adalah kuat dan positif dengan tingkat pengaruh sebesar 40,53% dengan asumsi bahwa X2, X3, X4 dan X5 adalah konstan. Pengaruh penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu (X2) terhadap pencairan anggaran DIPA (Y) adalah sebesar 7,008, maka dapat disimpulkan pengaruh antara variabel Pengaruh penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu terhadap pencairan anggaran DIPA adalah kuat dan positif dengan tingkat pengaruh sebesar 70,08% dengan asumsi bahwa X1, X3, X4, dan X5 adalah konstan. Pengaruh Aplikasi terhambat dengan jaringan (X3) terhadap pencairan anggaran DIPA (Y) adalah sebesar 5,223, maka dapat disimpulkan pengaruh antara variabel aplikasi terhambat dengan jaringan terhadap pencairan anggaran DIPA adalah kuat dan positif dengan tingkat pengaruh sebesar 52,23% dengan asumsi bahwa X1, X2, X4 dan X5 adalah konstan.

Pengaruh aplikasi yang sering berubah-ubah (X4) terhadap pencairan anggaran DIPA (Y) adalah sebesar 8,138, maka dapat disimpulkan pengaruh antara variabel aplikasi yang sering berubah-ubah terhadap pencairan anggaran DIPA adalah kuat dan positif dengan tingkat pengaruh sebesar 81,38% dengan asumsi bahwa X1, X2, X3, dan X5 adalah konstan. Pengaruh penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak buat (X5) terhadap pencairan anggaran DIPA (Y) adalah sebesar 6,120, maka dapat disimpulkan pengaruh antara variabel penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak buat terhadap pencairan anggaran DIPA adalah kuat dan positif dengan tingkat pengaruh sebesar 61,20% dengan asumsi bahwa X1, X2, X3, dan X4 adalah konstan. Koefisien korelasi berganda (multiple R) diperoleh nilai

0.939 atau mendekati angka 1. hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas pengimputan rencana Kerja melalui internet (X1), penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu (X2), aplikasi terhambat dengan jaringan (X3), aplikasi yang sering berubah-ubah (X4) dan Penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dbuat (X5) mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pencairan anggara DIPA (Y). Koefisien determinasi (R squared) sebesar 0.881 ini berarti bahwa besarnya sumbangan kelima variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 88,1% dengan kata lain terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara kelima variabel bebas terhadap pencairan anggaran DIPA (Y). Koefisien parsial (Adjusted R squared) sebesar 0.280 terhadap variabel Y adalah 28%. Uji-F dapat dilihat pada tingkat kepercayaan sebesar 95% secara statistik* menunjukkan uji-t dari masing-masing variabel independen yaitu Pengimputan rencana Kerja melalui internet., Penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu, Apalikasi terhambat dengan jaringan, Aplikasi yang sering berubah-ubah dan Penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dbuat secara bersama-sama atau simultan sangat signifikan terhadap pencairan anggaran DIPA (Y) yaitu sebesar 342,169 dengan tingkat signifikan : 0.000. Uji-t, dapat dilihat pada tingkat kepercayaan sebesar 95% secara statistik menunjukkan uji-t dari masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikan sebagai berikut.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara parsial, dapat dilakukan uji t, uji-t bermakna jika $p < 0,05$. Hasil perhitungan uji t-hitung vaiabel pengimputan rencana kerja melalui internet (X1) menunjukkan nilai sebesar 3,185 dengan tingkat signifikansi 0,05 pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, maka variabel

pengimputan rencana kerja melalui internet (X1) dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel pencairan anggaran DIPA (Y) dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa secara parsial variabel bahwa pengimputan rencana kerja internet berpengaruh signifikan terhadap pencairan anggaran DIPA pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian H_a diterima, karena $p = 0,003$ atau $p < 0,05$. Perhitungan uji t-hitung variabel penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu (X2) menunjukkan nilai sebesar 7,247 dengan tingkat signifikansi 0,05 pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, maka variabel penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu (X1) dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel pencairan anggaran DIPA (Y) dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa secara parsial variabel bahwa penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu berpengaruh signifikan terhadap pencairan anggaran DIPA pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian H_a diterima, karena $p = 0,000$ atau $p < 0,05$.

Hasil perhitungan uji t-hitung variabel aplikasi terhambat dengan jaringan (X3) menunjukkan nilai sebesar 4,595 dengan tingkat signifikansi 0,002 pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, maka variabel aplikasi terhambat dengan jaringan (X3) dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel pencairan anggaran DIPA (Y) dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa secara parsial variabel bahwa aplikasi terhambat dengan jaringan berpengaruh signifikan terhadap pencairan anggaran DIPA pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota

Palopo dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian H_a diterima, karena $p = 0,02$ atau $p < 0,05$. Perhitungan uji t-hitung variabel aplikasi yang sering berubah-ubah (X4) menunjukkan nilai sebesar 9,439 dengan tingkat signifikansi 0,000 pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, maka variabel aplikasi yang sering berubah-ubah (X4) dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel pencairan anggaran DIPA (Y) dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa secara parsial variabel aplikasi sering berubah-ubah berpengaruh signifikan terhadap pencairan anggaran DIPA pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian H_a diterima, karena $p = 0,000$ atau $p < 0,05$. Hasil perhitungan uji t-hitung variabel penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dibuat (X5) menunjukkan nilai sebesar 9,439 dengan tingkat signifikansi 0,003 pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, maka variabel penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dibuat (X5) dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel pencairan anggaran DIPA (Y) dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa secara parsial variabel penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dibuat berpengaruh signifikan terhadap pencairan anggaran DIPA pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian H_a diterima, karena $p = 0,001$ atau $p < 0,05$. Kelima variabel bebas sebagaimana telah dikemukakan di atas maka variabel bebas aplikasi sering berubah-ubah (X4) mempunyai pengaruh dominan terhadap pencairan anggaran DIPA (Y) pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo. Dengan demikian H_a diterima.

BAB V

PENUTUP

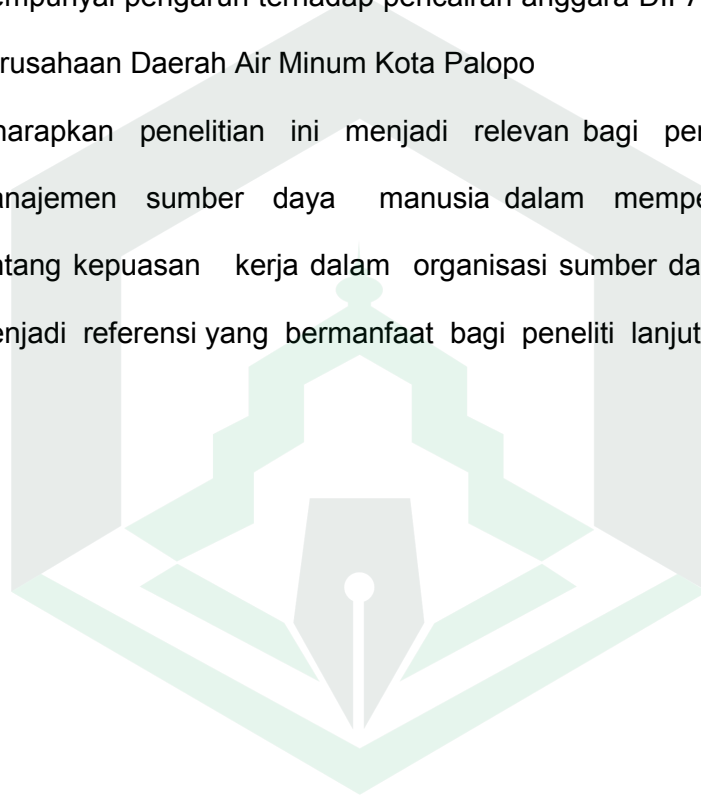
A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan analisis maka ada beberapa kesimpulan bahwa faktor-faktor penghambat dan pengaruhnya terhadap pencairan Anggaran DIPA pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo belum maksimal hal ini disebabkan karena

1. Pengimputan rencana Kerja melalui internet (X1), penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu (X2), aplikasi terhambat dengan jaringan (X3), aplikasi yang sering berubah-ubah (X4) dan Penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dbuat (X5) mempunyai pengaruh terhadap pencairan anggaran DIPA (Y) pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo
2. Sesuai Koefisien korelasi berganda (multiple R) diperoleh nilai 0.939 atau mendekati angka 1. hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pencairan anggaran DIPA (Y) pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo dan Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.881 ini berarti bahwa besarnya sumbangan kelima variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 88,1% dengan kata lain terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara kelima variabel bebas terhadap pencairan anggaran DIPA (Y) pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo.

B. Saran

- 1) Perlu adanya perhatian yang besar pada variabel bebas yaitu pengimputan rencana Kerja melalui internet (X1), penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu (X2), aplikasi terhambat dengan jaringan (X3), aplikasi yang sering berubah-ubah (X4) dan Penyusunan operasional kegiatan untuk 1 tahun mata anggaran tidak dibuat (X5) mempunyai pengaruh terhadap pencairan anggaran DIPA (Y) pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo
- 2) Diharapkan penelitian ini menjadi relevan bagi perkembangan ilmu manajemen sumber daya manusia dalam memperkaya referensi tentang kepuasan kerja dalam organisasi sumber daya manusia dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi peneliti lanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 **tentang keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran**
- Undang-undang No. 1/2004 **tentang Perbendaharaan Negara**
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 **Sistem Penganggaran Negara.**
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 **tentang Standard Akuntansi Pemerintahan**
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Adisaputro, Gunawan, Marwan Asri. 1995. *Anggaran Perusahaan. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Ahyari Agus, (2000), **Anggaran Perusahaan**. Pendekatan Kuantitatif Buku II, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Adisaputro, Gunawan dan Marwan Asri, **Anggaran Perusahaan (Business Budgeting):** Prinsip, Mekanisme, dan Teknik Penyusunannya, Yogyakarta, 1981.
- Adisaputro, Gunawan M.B.A Drs.dan Drs. Marwan Asri, M.B.A Edisi (2003/2004) buku **Manajemen Keuangan 1** BPFE UGM.
- Adisaputro, Gunawan dan Yunita Anggraini, (2007). **Anggaran Bisnis**, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Bustami, Bastian dan Nurlela, 2011, **Akutansi Biaya Teori dan Aplikasi**, Edisi pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ellen Christina, M. Fuad, Sugiarto, Edy Sukarno, (2001) **Manajemen Keuangan**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hansen & Mowen, (2011). **Manajemen Biaya**, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Garrison, Norren and Brewer. 2007. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan.** Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Hansen & Mowen, 2007. **Manajemen Biaya**, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.

- Harahap, Sofyan Syafri 2011. ***Budgeting Penganggaran: Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen***. Edisi Pertama, Cetakan Kedua, PT Indah Karya (Persero) Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Herawati dan Sunarto. 2004. ***Pedoman Penyajian Laporan Keuangan***. Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.
- Mardiasmo, 2004, ***Akuntansi Sektor Publik di Indonesia***, Cetakan pertama, penerbit : BPFE, Yogyakarta
- Munandar, (2008), ***Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum*** di Kota Palopo. Pendekatan Kuantitatif Buku II, Yogyakarta: BPFE UGM.
- M. Munandar Drs. ; ***Budgeting*** ; BPFE ; Yogyakarta
- Nafarin. M, (2007). ***Penganggaran Perusahaan***, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, 2011, ***Akutansi Manajemen Dasar-dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan*** , Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nafarin 2004. ***Manajemen Keuangan Perusahaan***. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyadi2011. ***Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa***, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Nafarin, M, 2007. ***Penganggaran Perusahaan***, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta
- Russell C. Swansburg.1995.***Pengembangan Staf Keperawatan: Suatu Komponen Pengembangan Sumber Daya Manusia***. Jakarta.Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Sugiyono, 2010. ***Metode Bisnis***, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Supriyanto, 2010. ***Anggaran Perusahaan: Pendekatan Kuantitatif*** Buku I Yogyakarta: BPFE UGM.
- Sirait,T.Justin, 2009 ***Anggaran Sebagai Alat Bantu Bagi Manajemen***